



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



JURNAL KEHUMASAN

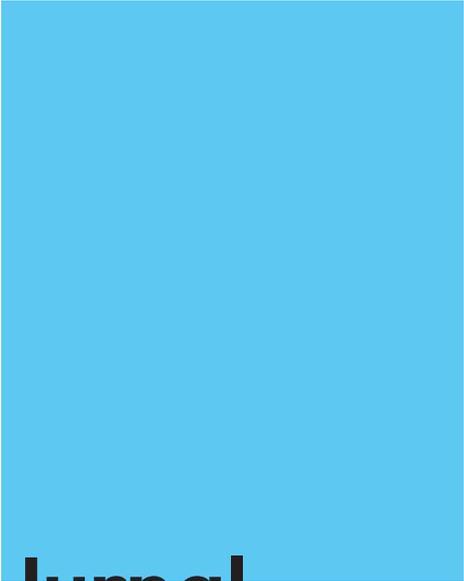
DINAMIKA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2024



Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara







Jurnal Kehumasan

Penanggung Jawab
Setya Utama

Pengarah
Eddy Cahyono Sugiarto

Pimpinan Redaksi
Faisal Fahmi

Redaktur dan Kontributor
Sari Ratna Nilam
R. Efa Febryana
Akhmad Firmannamal
Mulyaningsih
Oky Tri Handoko
Khairunnisaa
Salsabila Laily Tabayuni
Shofwah Hilyatul Auliya
Yumi Jocelin Sugiyama

Desain Grafis
Wulan Nawangsari

Sekretariat
Anugrah Syafieq Fahlevi

Kontak Redaksi

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara
Jl. Veteran No.17-18
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax.: (021) 384906
Email: humas@setneg.go.id

Foto: BPMI Sekretariat Presiden



Daftar Isi

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 2 | Daftar Isi | 35 | Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara |
| 3 | Kata Pengantar | 45 | Diseminasi Informasi |
| 5 | Profil Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | 56 | Penanganan Aksi Unjuk Rasa |
| 11 | Implementasi Keterbukaan Informasi Publik | 63 | Monitoring & Analisis Media |
| 18 | Kerjasama Hubungan Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik | 80 | Penghargaan |



Demokrasi menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diyakini serta dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi tumbuh dari suara rakyat yang tak pernah padam dan berakar dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga peran aktif dalam mengawal kebijakan di era modern. Setiap babakannya ditulis melalui partisipasi aktif rakyat, disertai harapan akan masa depan yang lebih baik dan berkeadilan.

Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Merekalah yang menentukan arah kebijakan serta keputusan strategis yang diambil pemerintah atas nama bangsa. Prinsip ini menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berdaulat, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sebagai sistem yang berpusat pada rakyat, demokrasi menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga merupakan komitmen kolektif untuk membangun negara yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum, serta mencerminkan niat tulus untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.

Salah satu wujud nyata dari demokrasi yang sehat adalah jaminan atas kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Hak ini secara tegas dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan ini menjadi dasar bagi terbangunnya ruang dialog dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Melalui penghargaan terhadap aspirasi rakyat, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.



Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang modern, akuntabel, dan inklusif, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekretariat Negara) memegang peran strategis sebagai institusi pendukung utama Presiden dan Wakil Presiden. **Kemensekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.** Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

Menjawab tantangan zaman yang menuntut transparansi dan keterlibatan publik, Kemensekretariat Negara menerapkan pendekatan *multi-stakeholder engagement* dalam pelaksanaan komunikasi publik. Pendekatan ini mengedepankan komunikasi dua arah yang terbuka dan kolaboratif, melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat sipil. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Prinsip ini menjadi pilar penting dalam membangun tata kelola komunikasi publik yang transparan, bertanggung jawab, dan demokratis.

Dengan landasan hukum yang kokoh, pendekatan komunikasi yang partisipatif, dan pengelolaan informasi yang inklusif, Kemensekretariat Negara berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung efektivitas komunikasi publik pemerintahan dan mendekatkan pemerintah kepada rakyat.





BAB I

**PROFIL
KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Foto: Humas Kemensetneg

PROFIL KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia telah berdiri sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada 19 Agustus 1945, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia. Dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kemensetneg memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga yang berada di jantung kekuasaan eksekutif, Kemensetneg menyelenggarakan fungsi dukungan teknis, administratif, dan analisis kebijakan di bidang kesekretariatan negara serta manajemen kabinet. Fungsi ini meliputi pengelolaan komunikasi publik kepresidenan, pengelolaan arsip dan dokumen negara, hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri, layanan keprotokolan negara, pelayanan rumah tangga kepresidenan, hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyusunan agenda kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, Kemensetneg juga memberikan telaahan strategis dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden, menjadikannya sebagai penghubung yang penting antara kebijakan strategis pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.

Pada tahun 2024 menjadi momen monumental dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, rakyat Indonesia telah memberikan mandat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Keduanya secara resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, menandai transisi dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Momen ini sekaligus menandai berakhirnya masa pengabdian Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara selama hampir satu dekade, sejak bergabung dalam Kabinet Indonesia Kerja (2014–2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019–2024). Estafet kepemimpinan Kemensetneg kini beralih ke **Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara** dalam Kabinet Merah Putih. Didampingi oleh **dua Wakil Menteri, yakni Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro**, formasi ini membawa

semangat baru dalam mendorong penguatan fungsi strategis Kemensetneg sebagai institusi yang mendukung pemerintahan secara profesional, transparan, dan efektif.

Dengan struktur organisasi yang solid dan dukungan sumber daya manusia yang andal serta tata kelola yang berorientasi pada hasil, Kemensetneg terus bertransformasi menjadi institusi birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman yang diharapkan mampu mengawal visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan penuh integritas dan dedikasi, serta menjadi garda terdepan dalam membangun sinergi antara negara dan rakyat.



Pratikno
Menteri Sekretaris Negara
Republik Indonesia ke-17



Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara
Republik Indonesia ke-18



Bambang Eko Suhariyanto
Wakil Menteri Sekretaris Negara



Juri Ardiantoro
Wakil Menteri Sekretaris Negara

PROFIL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Biro Humas Kemensetneg memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses komunikasi dan penyampaian informasi publik terkait Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara. Sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan tanggung jawab strategis untuk membangun narasi kebijakan secara akurat, inklusif, dan berorientasi pada transparansi.

Berada dalam lingkaran inti kekuasaan eksekutif, Biro Humas Kemensetneg memiliki visi untuk menjadi sumber informasi terpercaya, sekaligus menciptakan iklim informasi yang bebas dari disinformasi dan hoaks, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang terinformasi dengan baik (*well-informed society*).

Sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan komunikasi modern, Biro Humas Kemensetneg terus berinovasi dalam mempercepat dan memperluas akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Layanan informasi berbasis digital, seperti kanal media sosial resmi, portal berita internal, serta produksi konten multimedia yang interaktif dan berbasis data, menjadi bagian dari strategi diseminasi yang menysasar berbagai segmen masyarakat.



o: Humas Kemensetneg

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Biro Humas berada di bawah koordinasi Sekretariat Kementerian dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik Kementerian;
2. Pelaksanaan analisis, *monitoring*, dan evaluasi media arus utama dan media sosial terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian;
3. Pengelolaan media dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian;
4. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
5. Koordinasi hubungan komunikasi dan kerja sama kehumasan dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta kementerian/lembaga/instansi lain dan masyarakat;
6. Pelaksanaan diseminasi informasi kehumasan Kementerian melalui media publikasi berbasis teknologi informasi;
7. Pelaksanaan dukungan administrasi Biro Hubungan Masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.

Sepanjang tahun 2024, Biro Humas Kemensetneg telah menjalankan berbagai program komunikasi publik yang mendukung implementasi program-program prioritas pemerintah, termasuk sosialisasi agenda transformasi digital birokrasi, penguatan layanan publik berbasis data, serta dukungan terhadap penyampaian kebijakan Presiden kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk forum diskusi kebijakan, produksi konten, pelatihan literasi media, webinar/fgd serta penyelenggaraan *pers conference* dan siaran pers resmi berkala.

Selain itu, Biro Humas juga aktif dalam mengelola komunikasi publik untuk berbagai peristiwa dan agenda kenegaraan, seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029, peringatan Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, dan penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden di hadapan MPR/DPR/DPD DPR/MPR, termasuk juga memainkan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan *event* internasional strategis tahun 2024, seperti World Water Forum ke-10 di Bali.

Berbagai kegiatan kehumasan yang dijalankan oleh Biro Humas diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Seluruh capaian ini akan dikaji lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya dalam Jurnal Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2024 ini, sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan refleksi atas kinerja komunikasi pemerintah.



BAB II

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Foto: Humas Kemensetneg

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan secara transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel, dan profesional, guna menjamin hak publik atas informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika kebijakan, serta adanya penyesuaian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik menjadi semakin penting. Oleh karena itu, **dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi, saat ini sedang dilakukan proses pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemensetneg.**

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai upaya meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur dan kebutuhan organisasi dan tata kerja kementerian.

Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Guna meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam upaya mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pemberian informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien, maka ditetapkan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur (SOP):

- SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui pengumuman.
- SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui penanganan permohonan.
- SOP Pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.

- SOP Penanganan sengketa informasi yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui adjudikasi dan mediasi. SOP Penyusunan dan penetapan daftar informasi publik (DIP).
- SOP Pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
- SOP Pendokumentasian informasi publik.
- SOP Pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan.

Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Maklumat pelayanan PPID Kementerian Sekretariat Negara merupakan pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID Kementerian Sekretariat Negara yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Kementerian Sekretariat Negara menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

“

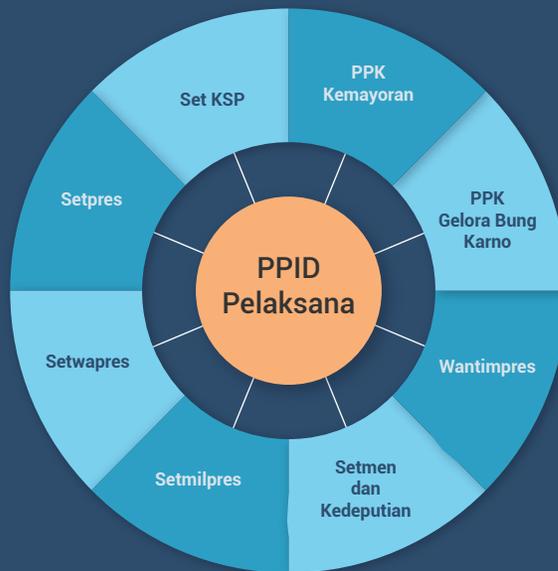
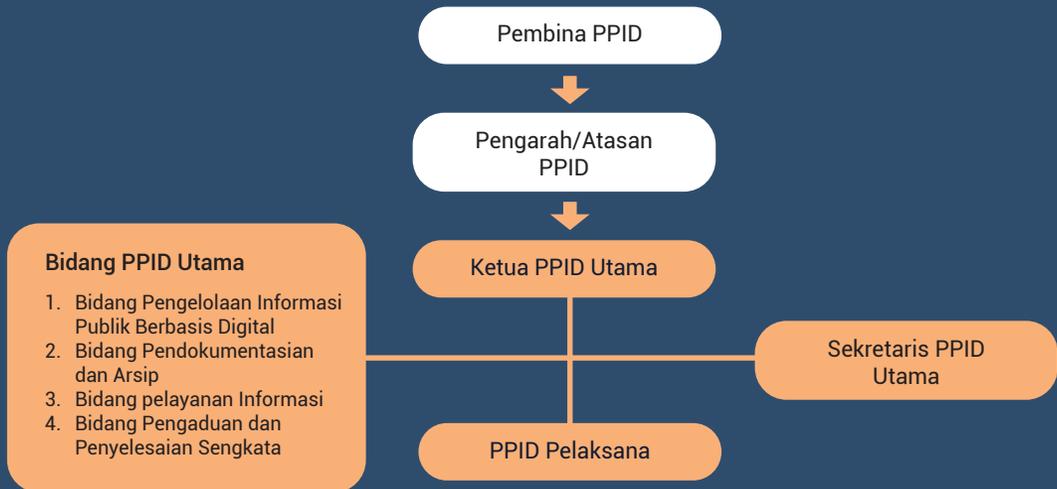
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara secara responsif, akurat, santun, dan akuntabel.

”

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Upaya Kementerian Sekretariat Negara untuk mengintegrasikan sistem dan data informasi publik sehingga pelayanan yang dilakukan dapat bertransformasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Struktur Organisasi PPID



- Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara selaku Pengarah/Atasan PPID Kemensetneg Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kemensetneg.

AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik, salah satunya melalui penyediaan layanan satu pintu yang terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi, seperti *email*, situs web resmi, serta media sosial Kemensetneg—termasuk Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube, dan TikTok. Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui prosedur, layanan, maupun informasi aktual terkait kegiatan dan kebijakan yang dijalankan, cukup dengan memindai *QR code* atau mengakses tautan yang tersedia.

Sebagai bagian dari upaya akselerasi komunikasi publik yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital, Kemensetneg juga terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan dan diseminasi informasi. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain: Setneg Mantul Goes to Campus, sebagai sarana edukasi publik kepada mahasiswa dan akademisi; Setneg ASIK Antusiasme dalam Kolaborasi Kreatif (Aspiratif, Solutif, Inklusif, dan Kolaboratif), sebagai forum interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat; SPACE (Setneg Punya Cerita), yang menyuguhkan narasi ringan dan inspiratif mengenai aktivitas pemerintahan; serta SERASI (Setneg Serap Aspirasi), yang membuka ruang dialog dua arah untuk menyerap masukan publik.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pindai QR Code di atas atau akses melalui tautan
linktr.ee/PelayananPublikKemensetneg
untuk melihat Daftar Pelayanan Publik
Kementerian Sekretariat Negara

www.setneg.go.id

Selain itu, berbagai kegiatan kehumasan lainnya seperti pelatihan komunikasi publik, produksi konten kreatif, serta penyelenggaraan forum-forum komunikasi strategis juga terus digencarkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam dinamika pemerintahan.

Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jumlah
Sekretariat Kementerian dan Kedeputian	246	142	8	258	654
Sekretariat Presiden	62	-	-	-	62
Sekretariat Wakil Presiden	26	18	-	-	44
Sekretariat Militer Presiden	30	-	-	6	36
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	8	21	-	-	29
Kantor Staf Kepresidenan	27	11	-	9	47
Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno	18	-	-	-	18
Pusat Pengelola Komplek Kemayoran	32	54	10	10	106
Total	449	246	18	283	996

Daftar Informasi Publik

No	Bulan	Pemohon Informasi	Rata-Rata Waktu Penanganan (hari)		Informasi	Permohonan yang Dipenuhi	Permohonan yang Ditolak
1	Januari	1	10	Hari	1	1	0
2	Februari	1	1	Hari	1	1	0
3	Maret	5	10	Hari	5	2	3
4	April	4	3	Hari	4	3	1
5	Mei	2	5	Hari	1	0	2
6	Juni	1	9	Hari	1	1	0
7	Juli	2	9	Hari	2	1	1
8	Agustus	3	4	Hari	3	1	2
9	September	3	5	Hari	3	1	2
10	Oktober	1	3	Hari	6	0	6
11	November	2	10	Hari	2	1	1
12	Desember	2	10	Hari	2	1	1
Total		27	79	Hari	31	13	19

- Sepanjang Tahun 2024, PPID Kementerian Sekretariat Negara telah menangani 2 Sengketa Informasi, baik Ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, Sidang Sengketa Informasi di PTUN, dan/atau Kasasi Mahkamah Agung



BAB III

KERJA SAMA HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Foto: Humas Kemensetneg

Implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara sendiri, namun juga diperlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Upaya ini menghasilkan *multi stakeholders engagement* yang memaksimalkan gaung dari upaya penyebaran informasi yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Upaya ini diharapkan mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar namun juga di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dengan begini, informasi yang didapat menjadi pondasi bagi masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya-upaya Kemensetneg dimaksud dikemas dalam kegiatan-kegiatan interaktif yang memungkinkan seluruh kalangan masyarakat, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum mampu menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selama 2024, terdapat 29 kegiatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Kemensetneg.

KUNJUNGAN DELEGASI

1. Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pertiba



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan delegasi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Universitas Pertiba, Bangka Belitung pada Senin (15/1/2024). Dalam kegiatan ini, dijelaskan tentang World Water Forum (WWF) 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia, serta peran strategis Kemensetneg dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan isu krisis air yang terkait dengan perubahan iklim serta pentingnya tindakan preventif.



2. Kunjungan SMP Prima Cendekia Islami Bandung

Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan 99 siswa SMP Cendekia Islami Bandung pada Rabu (24/1/2024). Pada kesempatan tersebut, Biro Humas memberikan wawasan tentang peran Kemensetneg dalam mendukung pemerintahan, serta pentingnya menjaga kesehatan mental di era media sosial. Kegiatan ini mencakup pemahaman tentang dampak media sosial pada remaja, pengenalan diri, dan refleksi diri, dengan tujuan menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.



3. Kunjungan Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Biro Humas menerima 35 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi (HMPS Kom), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pada Senin (29/01/2024). Kegiatan ini sebagai upaya Biro Humas menjalin kerja sama dengan kalangan akademisi dalam hal menyukseskan kerja-kerja pemerintah, utamanya mengenai Ibu Kota Nusantara. Dalam kegiatan ini, dibahas urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang salah satunya sebagai penunjang kemajuan Indonesia.

4. Kunjungan SMA Citra Kasih Jakarta



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan *field trip* mahasiswa SMA Citra Kasih pada Rabu (24/4/2024), guna memberi wawasan lebih dalam tentang peran penting Kemensetneg dalam mendukung tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden, serta fungsi dan alur kerja lembaga-lembaga negara. Selain itu para siswa juga diperkenalkan pada World Water Forum (WWF) ke-10, yang diselenggarakan di Bali pada 18 s.d. 24 Mei 2024.

5. Kunjungan Mahasiswa Fakultas Studi Vokasi Universitas Indonesia



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Humas, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dengan mengangkat tema "*Governance and Ethics: The UI PR Insight Tour to the State Secretariat of Indonesia*" pada Jum'at (26/4/2024). Kunjungan ini membahas mengenai Transformasi Kehumasan di Era Digitalisasi serta Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10.

6. Kunjungan Universitas Padjadjaran



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan mahasiswa Program Studi Kearsipan Digital Universitas Padjadjaran pada Kamis (13/6/2024) untuk mempelajari pengelolaan arsip digital, khususnya pengelolaan Arsip Kepresidenan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam mengembangkan pelayanan publik menuju Indonesia Maju 2045.

7. Kunjungan Universitas Balikpapan



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan pada Senin (1/7/2024) untuk memberikan wawasan mengenai peran strategis Kemensetneg serta urgensi kerjasama dan inovasi dalam pembangunan IKN. Diskusi juga menyoroti bagaimana konsep *smart city* di IKN akan mendukung kemajuan bangsa.

8. Kunjungan SMA Labschool Jakarta



Kemensetneg melalui Biro Humas menerima kunjungan lebih dari 300 siswa dan pengajar dari SMA Labschool Jakarta untuk memperkenalkan visi Indonesia Maju 2045 serta pentingnya inovasi, kreativitas, dan daya adaptif bagi generasi muda pada Kamis (18/7/2024). Kegiatan ini juga termasuk paparan tentang pembangunan sumber daya manusia, upaya pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045, serta peran generasi muda dalam pembangunan bangsa.

9. Kunjungan Mahasiswa UIN Jambi



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan dari mahasiswa dan dosen Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Selasa (23/7/2024) dalam rangka memberikan wawasan mengenai peran generasi muda dalam mendukung visi Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kegiatan ini juga menyoroti prinsip *zero mistake* dalam kinerja Kemensetneg sebagai bagian dari jantung pemerintahan.

10. Kunjungan Indonesia Student & Youth Forum 2024



Sejalan dengan HUT ke-79 Kemerdekaan RI “Nusantara Baru Indonesia Maju”, dibutuhkan semangat besar dari generasi muda bangsa Indonesia. Dalam rangka menggaungkan peringatan HUT RI tahun ini pula, berbagai kolaborasi dilakukan untuk mendukung euforia Bulan Kemerdekaan. Turut mendukung kegembiraan bulan ini, Kemensetneg menerima kunjungan 196 peserta Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) pada Jumat (2/8/2024).

11. Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Kamis (8/8/2024), untuk mendapatkan wawasan mengenai peran generasi muda dalam mendukung Indonesia Maju 2045. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diberi penjelasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah mempercepat transformasi birokrasi dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

12. Kunjungan MTs Al Wathoniyah Al Hamidiyah



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan siswa-siswi MTs Al Wathoniyah Al Hamidiyah pada Senin (26/8/2024) dalam kegiatan edukatif yang bertujuan memperluas wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang peran lembaga negara. Kunjungan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan global serta mewujudkan Indonesia Maju 2045.

13. Kunjungan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada



Biro Humas Kemensetneg menerima kunjungan studi mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jum'at (27/9/2024). Kegiatan bertajuk Politico Tour ini menyoroti peran strategis generasi muda, urgensi memahami politik secara multidisipliner, serta peran dan tugas Kemensetneg dalam mendukung pelaksanaan demokrasi dan birokrasi pemerintahan.

SETNEG MANTUL GOES TO CAMPUS



1. Setneg Goes to Campus Edisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Biro Humas Kemensetneg menggelar Setneg Mantul Goes to Campus "Road to WWF 2024" bertajuk "Kontribusi Indonesia dalam World Water Forum ke-10 Tahun 2024" bersama Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Kamis (15/2/2024). Kegiatan ini merupakan upaya dalam membangun *collaborative governance* dengan sivitas akademika yang telah sangat intens dilakukan dan akan terus ditingkatkan untuk menyukseskan WWF 2024.



2. Kemensetneg Goes to Campus Edisi Universitas Mulawarman

Biro Humas Kemensetneg menyelenggarakan Setneg Mantul Goes to Campus dengan tema, "Generasi Muda: Merajut Masa Depan, Mewujudkan Indonesia Emas 2045" di Universitas Mulawarman pada Selasa (20/2/2024). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sinergi yang kuat untuk kemajuan Indonesia, menyiapkan Indonesia Emas 2045, dan menyukseskan pembangunan IKN dan rencana peringatan HUT Ke-79 RI 2024 di IKN.



3. Kemensetneg Goes to Campus Edisi Universitas Syiah Kuala

Biro Humas Kemensetneg selenggarakan Setneg Mantul Goes to Campus Road to WWF pada Selasa (27/02) di Universitas Syiah Kuala, sebagai bentuk ajakan kepada akademisi, komunitas masyarakat, serta generasi muda untuk berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam mendukung agenda pengelolaan air untuk kesejahteraan.



4. Setneg Goes to Campus Edisi Universitas Balikpapan

Biro Humas Kemensetneg mengadakan Setneg Mantul Goes to Campus di Universitas Balikpapan pada Jum'at (8/3/2024) sebagai rangkaian upaya glorifikasi terkait progres pembangunan IKN dan rencana peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara.



5. Setneg Goes to Campus Edisi Universitas Pendidikan Indonesia

Biro Humas Kemensetneg menyelenggarakan Setneg Mantul Goes to Campus di Universitas Pendidikan Indonesia pada Senin (13/5/2024), sebagai rangkaian upaya mengglorifikasi pelaksanaan World Water Forum 2024. Harapannya dengan adanya acara ini, masyarakat luas dapat memiliki kesadaran akan pentingnya isu air, bersamaan dengan kesempatan besar Indonesia sebagai tuan rumah 10th World Water Forum 2024.

MEDIA VISIT



1. Kemensetneg Menyambangi Kantor Berita Tribun Samarinda

Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Media Tribun Samarinda (20/2/2024) dalam mengglorifikasi pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pelaksanaan HUT ke-79 RI di Nusantara. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pers media guna menghadirkan narasi-narasi positif yang memotivasi seluruh kalangan. Hal ini juga menjadi bagian dalam membangun *multi stakeholders engagement* dalam mendukung program prioritas pemerintah.

2. Kemensetneg Kunjungi RRI Pro2 FM Banda Aceh



Dalam rangka Indonesia sebagai Tuan Rumah World Water Forum 2024, Kementerian Sekretariat Negara menggandeng Radio Republik Indonesia Pro2 FM (26/2/2024) sebagai bagian dari pers media yang membantu menyiarkan narasi-narasi optimis dan positif kepada masyarakat. Sekaligus, langkah ini juga turut memantik kebanggaan bersama seluruh rakyat Indonesia yang ditunjuk sebagai Tuan Rumah World Water Forum 2024

3. Kemensetneg Kunjungi Media Serambi Indonesia



Kemensetneg merangkul sebanyak mungkin pihak untuk menciptakan optimisme dan narasi positif, utamanya dalam isu-isu yang bersifat global. Pada Senin (26/02/2024) Harian Serambi Indonesia Banda Aceh menjadi pihak yang dirasa tepat untuk menjadi rekan Kemensetneg dalam menyebarkan semangat optimis sebagai tuan rumah WWF sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya cadangan air dunia untuk kesejahteraan bersama.



4. Kemensetneg Gandeng Media Kaltim Post

Dalam rangkaian Setneg Mantul Goes to Campus Edisi Balikpapan, Kemensetneg turut mengunjungi Kaltim Post sebagai salah satu media terbesar di Kalimantan Timur pada Kamis (07/03/2024). Langkah ini sebagai upaya untuk menggandeng kalangan media dalam membantu mendiseminasikan penyelarasan *positive framing* masyarakat dalam membantu pemerintah mengglorifikasikan ruang publik dengan optimisme pembangunan, utamanya pembangunan IKN dan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.



5. Kemensetneg Media Visit ke Suara Merdeka Magelang

Biro Humas Kemensetneg melakukan kunjungan media ke kantor redaksi Suara Merdeka, Magelang pada Jum'at (25/10/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung komunikasi publik terkait program pemerintah, termasuk inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kedaulatan Pangan. Diharapkan, melalui kemitraan strategis ini, Kemensetneg dan Suara Merdeka dapat lebih efektif dalam menyediakan informasi yang akurat dan edukatif bagi masyarakat.

SETNEG MENYAPA



1. Kemensetneg Kunjungi Otorita Ibu Kota Nusantara

Kunjungan Biro Humas Kemensetneg ke Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Jum'at (26/1/2024), berupaya untuk menjalin kerja sama serta menyamakan visi diseminasi IKN kepada masyarakat luas. Kunjungan ini juga sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai *smart and green city* yang akan dibangun di IKN sehingga meningkatkan kepercayaan publik terkait pembangunan IKN.

2. Kemensetneg Turut Serta Dalam GPR Conference

Pelaksanaan HUT ke-79 RI di Nusantara perlu dukungan semua pihak dalam menciptakan atmosfer dan narasi positif di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Kemensetneg turut aktif dalam mengaungkan hal dimaksud melalui kanal GPR Conference yang diselenggarakan oleh PR Indonesia pada Kamis (22/02/2024). Dalam kegiatan ini, Kemensetneg turut menyampaikan beberapa hal terkait progress pembangunan IKN, dan persiapan pemerintah dalam perayaan HUT Kemerdekaan Ke-79 RI di IKN.





3. Gandeng Microsoft Indonesia, Kemensetneg Gaungkan *Digital Public Relation*

Seiring perkembangan teknologi, Kemensetneg menilai pentingnya membangun birokrasi digital untuk menghadirkan layanan publik yang modern, adaptif, dan terintegrasi. Dalam semangat ini, Kemensetneg mengunjungi Microsoft Indonesia pada Selasa (25/06/2024) untuk mencari inspirasi pengembangan digital di masa depan. Pemanfaatan teknologi dalam *Government Public Relations* (GPR) juga diarahkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar penggunaan alat atau platform.

4. Kementerian Sekretariat Negara Sambangi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemensetneg berkomitmen menjadi pelopor perubahan positif dalam pemerintahan dengan melibatkan berbagai pihak agar dampaknya lebih luas. Komitmen ini diwujudkan melalui program "Setneg Mantul: Akselerasi Digital Pemerintah Menuju Indonesia Maju 2045." Sebagai langkah awal, Kemensetneg mengunjungi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Rabu (03/07/2024), untuk memperkenalkan program ini sebagai bagian dari upaya mendorong digitalisasi birokrasi di Indonesia.



5. Kemensetneg Turut Sukseskan Konvensi Pranata Humas 2024



Kemensetneg turut serta dalam Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Iprahumas 2024 bertema Konsolidasi Humas Pemerintah Menuju Pembangunan Indonesia-Sentris yang digelar pada Rabu (17/7/2024) di Bandung. Dalam kesempatan ini, Kemensetneg menegaskan peran strategis Humas Pemerintah dalam menyampaikan agenda prioritas nasional, khususnya dalam mendorong transformasi digital untuk memperkuat keterlibatan publik dalam pembangunan berkelanjutan.

6. Setneg Asik (Antusiasme dalam Kolaborasi Kreatif)



Kemensetneg menggelar forum diskusi bertajuk Setneg Asik (Antusiasme dalam Kolaborasi Kreatif) dengan tema Akselerasi *Digital Government Public Relations* pada Rabu (07/07/2024). Kegiatan ini melibatkan humas pemerintah, praktisi kehumasan, generasi muda, akademisi, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dibuka dengan *Keynote Speech* dari Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan Usman Kansong, Direktur Jenderal

Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menyampaikan materi *Digital Public Relations*, Kemensetneg menghadirkan narasumber Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat;

Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia; Hery Kurniawan, Wakil Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia; dan Hartyo Harkomoyo, Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri.





BAB IV

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Foto: fauxels pada Pexel

SURVEI KEPUASAN PENERIMAAN KUNJUNGAN MASYARAKAT

Kementerian Sekretariat Negara senantiasa berupaya meningkatkan kualitas berbagai layanan publik yang diselenggarakan di lingkungan internalnya, salah satunya adalah layanan kunjungan masyarakat. Layanan ini menjadi wadah bagi publik untuk mengenal lebih dekat fungsi, peran, serta nilai-nilai yang dijalankan oleh Kemensetneg sebagai institusi strategis di jantung pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Kemensetneg secara aktif menerima dan mengelola umpan balik (*feedback*) dari para pengunjung, baik secara langsung melalui interaksi tatap muka maupun secara tidak langsung melalui kanal survei yang diberikan setelah kegiatan berlangsung.

Kemensetneg berkomitmen untuk memastikan bahwa program kunjungan masyarakat tidak hanya bersifat seremonial atau formalitas belaka, tetapi juga menjadi media edukatif, sarana diseminasi informasi, serta cerminan akuntabilitas lembaga dalam merespons aspirasi dan kebutuhan publik. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta membangun pemahaman kolektif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung kerja-kerja Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, Kemensetneg juga menyelenggarakan Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Masyarakat secara berkala. Survei ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas layanan, tingkat kepuasan pengunjung, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai bahan refleksi atas kinerja internal, tetapi juga sebagai dasar strategis dalam penyusunan program peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan mekanisme pelayanan, serta pengembangan inovasi layanan publik.

Kemensetneg terus membuka ruang partisipatif dan mengapresiasi setiap bentuk masukan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat umum, kalangan akademisi, maupun kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata.

A. Pertanyaan Dalam Bentuk Skala

Pada tahun 2024, capaian *outcome* indeks pelayanan informasi publik dalam penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan hasil yang melampaui target. Dari target indeks pelayanan sebesar 4,15 skala Likert (1-6), realisasi mencapai **5,49 skala 6**.

5,49
skala 6

Hasil ini mencerminkan bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) kepada kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi tentang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), baik dari segi materi yang diberikan maupun kualitas pelayanan secara keseluruhan, berada di atas target indeks pelayanan.

Teknik penilaian skala Kepuasan Kerja yang digunakan mengacu pada *summated ranking* dari skala Likert yang meliputi 6 alternatif jawaban, yaitu jawaban Sangat Setuju/Puas (**SS**) subjek akan memperoleh skor 6, jawaban, Setuju/Puas (**S**) subjek akan mendapatkan skor 5, Agak Setuju/Puas (**AS**) subjek akan mendapatkan skor 4, Agak Tidak Setuju/Puas (**ATS**) subjek akan mendapatkan skor 3, Tidak Setuju/Puas (**TS**) subjek akan mendapatkan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju/Puas (**STS**) subjek akan mendapatkan skor 1.

Pelaksanaan survei diukur melalui penilaian pelayanan publik dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
2. Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
3. Ketetapan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

4. Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
5. Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.
6. Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik.
7. Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik.
8. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik.
9. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik.
10. Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
11. Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobby, ruang ibadah, toilet, dan fasilitas bagi difabel).
12. Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/ elevator, dan alat pendukung K3).



Foto: Humas Kemensetneg

B. Pertanyaan Ya/Tidak

Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara?

C. Pertanyaan Isian

Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara?

1. Informasi/layanan publik lain terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara yang dibutuhkan.
2. Berikan kritik/saran Anda guna perbaikan layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Pada tahun 2024, dilakukan penilaian terhadap kualitas layanan publik dalam menerima 14 kunjungan perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. Universitas Pertiba
2. SMP Prima Cendekia Islami
3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. SMA Citra Kasih
5. Fakultas Studi Vokasi Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia
6. Universitas Mulawarman
7. Universitas Padjadjaran
8. Universitas Balikpapan
9. SMA Labschool Jakarta
10. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
11. Indonesia Student Youth Forum
12. Universitas Muhammadiyah Palembang
13. MTs Al Wathoniyah Al Hamidiyah
14. Universitas Gadjah Mada

D. Lokasi Pengumpulan Data Survey

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lingkungan kantor Kementerian Sekretariat Negara maupun di tempat lain pada saat penerimaan delegasi. Berikut gambaran ruang penerimaan delegasi:

a. Gedung Krida Bhakti



b. Ruang Rapat Gedung III Kemensetneg



c. Ruang Aspirasi



d. Ruang Auditorium Serba Guna



e. Ruang Sidang Kabinet



E. Jumlah Responden

Asal Delegasi



Universitas
Pertiba



Universitas
Mulawarman



UIN Sultan Thana
Saifuddin Jambi



Universitas Gadjah
Mada



SMP Prima
Cendikia Islami



Universitas
Padjajaran



Indonesia Student
Youth Forum



Fakultas Studi Vokasi
Program Studi
Hubungan Masyarakat
Universitas Indonesia



Universitas Atma
Jaya Yogyakarta



Universitas
Balikpapan



Universitas
Muhammadiyah
Palembang



SMA Citra Kasih

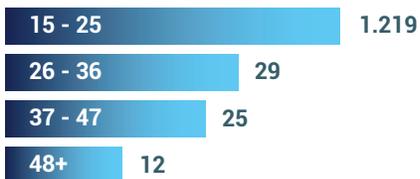


SMA Labschool
Jakarta



MTs Al Wathoniyah
Al Hamidiyah

Umur



Jenis Kelamin

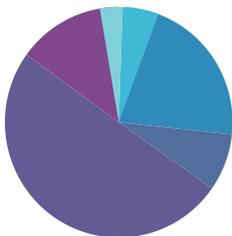


768 orang

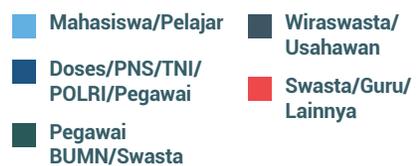
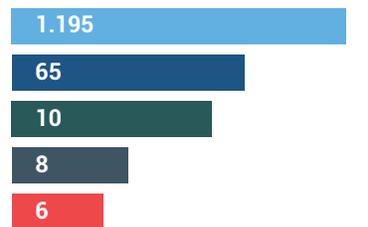


517 orang

Pendidikan

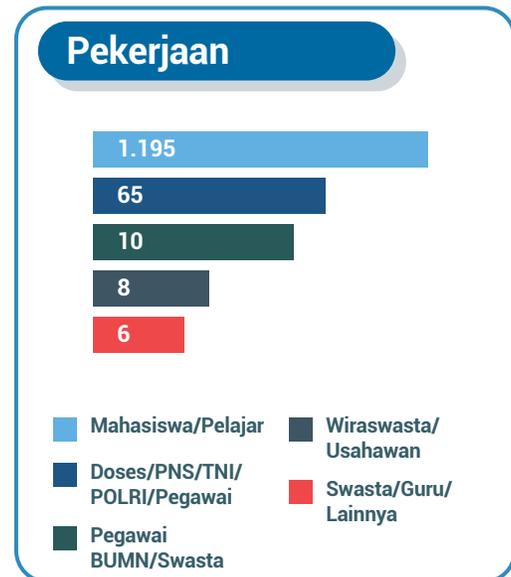
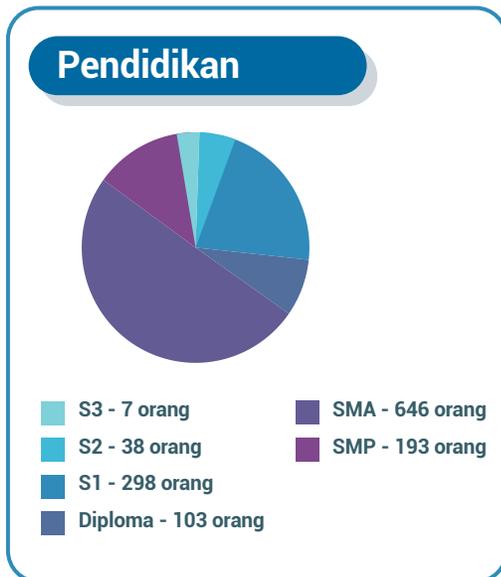
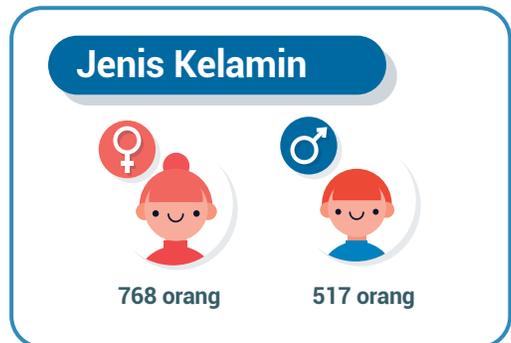
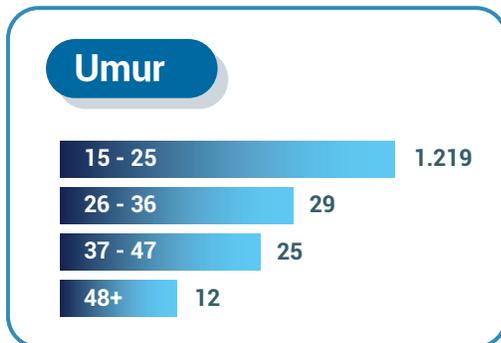


Pekerjaan



F. Rekapitulasi Data Responden

a. Rekapitulasi Data Responden



b. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Unsur Kuesioner		Jawaban Responden						Total
		SS	S	AS	ATS	TS	STS	
U1	Kemudahan prosedur layanan publik	621	439	168	22	5	7	1.262
U2	Kecepatan layanan publik	610	449	173	19	5	6	1.262
U3	Ketepatan penyelesaian layanan publik	614	433	171	30	10	4	1.262
U4	Manfaat dari kegiatan layanan publik	672	417	144	19	6	4	1.262
U5	Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan	694	396	142	18	3	9	1.262
U6	Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik	703	400	129	19	4	7	1.262
U7	Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik	735	377	124	15	4	7	1.262
U8	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik	701	379	138	21	7	5	1.262
U9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik	795	344	98	14	5	6	1.262
U10	Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik	733	361	143	18	7	5	1.262

Unsur Kuesioner		Jawaban Responden						Total
		SS	S	AS	ATS	TS	STS	
U11	Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik	741	338	145	25	7	6	1.262
U12	Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, alat pendukung K3)	706	379	147	18	6	6	1.262
Unsur Kuesioner		8.325	4.712	1.722	238	69	72	15.138
Unsur Kuesioner		49.950	28.272	10.332	1.428	414	432	90.828
Unsur Kuesioner		54,9%	31,1%	11,3%	1,5%	0,4%	0,8%	100%



BAB V

DISEMINASI INFORMASI

Foto: Magnus Mueller pada Pexel

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, media digital telah menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Bagi Kemensetneg, media digital berperan sebagai instrumen esensial dalam memperluas jangkauan diseminasi informasi kepada masyarakat. Melalui media digital, Kemensetneg mampu membangun jalur komunikasi langsung dengan publik, melampaui pendekatan tradisional dengan menghadirkan interaksi yang lebih dinamis dan inklusif.

Tidak hanya itu, kemampuan media digital untuk menjangkau berbagai kelompok demografi memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal dalam mengakses informasi penting. Sejalan dengan komitmen Kemensetneg untuk beradaptasi dengan ekspektasi publik yang terus berkembang, media digital juga memegang peranan strategis dalam menangkal misinformasi dengan memastikan masyarakat menerima informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Melalui pemanfaatan media digital, Kemensetneg diharapkan mampu menyampaikan informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, serta Kemensetneg secara responsif, transparan, dan akurat.

Implementasi upaya diseminasi informasi melalui media digital tercermin dalam pemanfaatan situs web resmi Kemensetneg, www.setneg.go.id, serta berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Pemilihan platform media sosial ini didasarkan pada tingginya tingkat aktivitas masyarakat Indonesia di berbagai kanal digital tersebut, sehingga memungkinkan Kemensetneg untuk menjangkau audiens secara lebih efektif dan luas. Sepanjang 2024, Kemensetneg turut menyebarkan informasi mengenai kegiatan dan acara nasional maupun internasional serta program prioritas yang digagas Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

Foto: Humas Kemensetreg



1. HLF MSP 2024 DAN IAF KE-2

Guna memeriahkan rangkaian kegiatan serta menyebarkan informasi mengenai High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 yang diselenggarakan pada 4–6 Juni 2024 di Nusa Dua, Bali, dan Indonesia Asia Forum (IAF) ke-2 yang berlangsung pada 7 Juni 2024 di lokasi yang sama, Biro Humas Kemensetneg turut aktif menyampaikan informasi edukatif kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi. Selain itu, Biro Humas juga membagikan beragam kisah menarik yang berkaitan dengan forum-forum tersebut, sebagai bagian dari upaya diseminasi informasi yang mendorong pemahaman masyarakat terhadap isu-isu strategis, kolaborasi lintas sektor, serta posisi Indonesia dalam percaturan global.

Konten HLF MSP 2024 & IAF ke-2



50 konten *feed*



16 konten *reels*

2. WORLD WATER FORUM KE-10

Biro Humas Kemensetneg secara aktif berperan dalam memeriahkan rangkaian acara dan menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Melalui berbagai kanal media sosial resmi Kemensetneg, Biro Humas menyajikan konten edukatif dan info serta sorotan kegiatan selama forum berlangsung. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap isu-isu strategis seputar ketahanan air dan peran aktif Indonesia dalam diplomasi global di bidang sumber daya air.

Konten World Water Forum ke-10



90 konten *feed*



29 konten *reels*

3. IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Dalam upaya menyebarkan perkembangan pembangunan IKN, Biro Humas Kemensetneg telah mendiseminasi informasi edukatif serta membagikan cerita menarik seputar IKN, khususnya terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dalam persiapan menjelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Konten Ibu Kota Nusantara



53 konten *feed*



6 konten *reels*

4. KONTEN KREATIF

1. Setneg Mantul

Setneg Mantul merupakan strategi komunikasi dari Kemensetneg yang bertujuan menyampaikan berbagai aktivitas dan pencapaian Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara dengan cara yang kreatif dan efektif kepada masyarakat. Salah satu kegiatan unggulannya, Setneg Mantul Goes to Campus, mengajak mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi interaktif sekaligus mendukung program prioritas nasional.



2. Setneg Sepekan

Setneg Sepekan adalah konten yang menyajikan rangkuman aktivitas Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara/Kemensetneg selama satu minggu. Informasi ini disajikan melalui video dan tulisan yang diunggah di media sosial resmi Kemensetneg



3. SPACE (Setneg Punya Cerita)

SPACE adalah konten wawancara dengan pimpinan tinggi madya, ASN berprestasi, hingga SDM inspiratif di lingkungan Kemensetneg. Kisah-kisah inspiratif SPACE bertujuan menyebarkan informasi positif yang dapat memotivasi dan mendukung masyarakat.



4. Setneg Real

Setneg Real adalah konten kreatif inovatif yang dikembangkan oleh Biro Humas Kemensetneg, hadir dalam format video kekinian yang selalu selaras dengan perkembangan zaman dan tren terbaru. Setneg Real menyajikan informasi dengan cara yang segar, dinamis, dan mampu menarik perhatian masyarakat luas.



5. SetnegPedia

SetnegPedia adalah salah satu konten informasi Biro Humas yang membahas tentang fakta-fakta menarik dan informatif seputar program-program Kemensetneg serta kebijakan pemerintah secara umum.



6. Setneg ASIK

Setneg ASIK (Antusiasme Dalam Kolaborasi Kreatif) mendorong kolaborasi kreatif dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi terkait kebijakan publik, dengan menghubungkan pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Setneg ASIK dikemas dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan pemanfaatan teknologi digital, yang memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan edukatif dalam membangun citra positif negara dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045.



7. Sorot Setneg

Sorot Setneg adalah konten bulanan dari Kemensetneg yang merangkum berbagai kegiatan Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Sekretaris Negara/Kemensetneg selama satu bulan.



8. SERASI (Setneg Serap Aspirasi)

SERASI (Setneg Serap Aspirasi) adalah program komunikasi publik yang diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Hubungan Masyarakat sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan untuk menjangkau aspirasi, kritik, masukan, serta ide konstruktif dari publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi, serta membangun kedekatan dengan berbagai kelompok seperti akademisi, komunitas sipil, dan generasi muda, melalui berbagai format seperti diskusi publik, dialog daring, survei aspirasi, dan kolaborasi dengan mitra strategis, sejalan dengan semangat transformasi komunikasi publik yang adaptif, inklusif, dan kolaboratif.



9. Kaleidoskop Setneg

Kaleidoskop Setneg merupakan rangkuman tahunan yang menyoroti berbagai capaian, kebijakan, serta agenda penting yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kemensetneg sepanjang tahun. Kaleidoskop Setneg menjadi ini refleksi atas perjalanan pemerintahan selama satu tahun, sekaligus menjadi arsip informasi bagi masyarakat.



10. Majalah Inovasi

Edisi World Water Forum ke-10 menyajikan berbagai artikel yang mengulas Indonesia-sentris di dalam gelaran internasional tersebut. Selain rubik publik dari komunitas di Bali, juga terdapat rubik peran strategis Kemensetneg dalam menunjang penyelenggaraan event tersebut pada tanggal 18-25 Mei 2025 di Bali.



4. KONTEN KREATIF

1. Audience Overview - Website

Pengguna	1.300.000
Pengguna Baru	1.448.000
Jumlah Sesi per Pengguna	0,66
Tayangan Halaman	2.500.000
Halaman/Sesi	2,0
Durasi Sesi Rata-rata	00:00:37
Rasio Pantulan	48%

2. Konten Populer Website

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024
Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
Presiden Prabowo Lantik Para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara
Politik Digital: Keterlibatan Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pesta Demokrasi 2024
Profil Menteri Sekretaris Negara
Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Umumkan 56 Wakil Menteri Pada Kabinet Merah Putih
Profil Pejabat Eselon I
Demokrasi Kerakyatan Dalam Perspektif Mohammad Hatta

3. Media Sosial



Youtube

Kementerian Sekretariat Negara RI

Bergabung: 18 September 2015

Verifikasi: 23 September 2015

Subscribers: 220 K



X

@kemensetnegRI

Bergabung: 18 September 2015

Verifikasi: 23 September 2015

Followers: 713 K



Instagram

@kemensetneg.ri

Bergabung: 9 Oktober 2015

Verifikasi: 12 November 2015

Followers: 754 K



Tiktok

@kemensetneg.ri

Bergabung: 11 Januari 2023

Verifikasi: 27 Agustus 2023

Followers: 11 K



Facebook

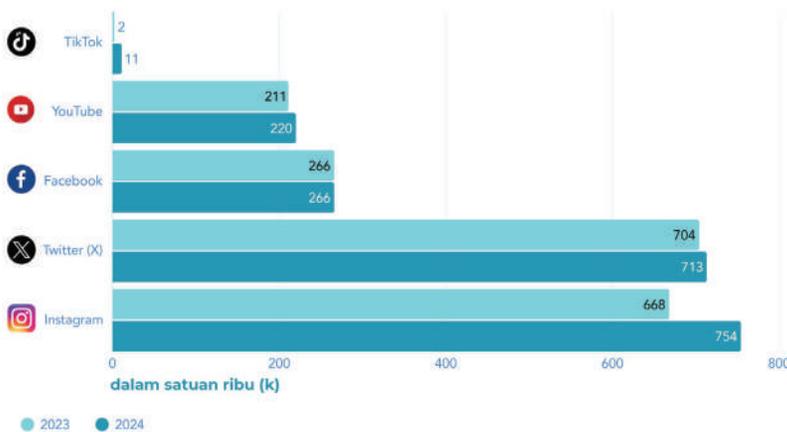
Kementerian Sekretariat Negara RI

Bergabung: 9 Oktober 2015

Verifikasi: 12 November 2015

Followers: 266 K

Kinerja Media Sosial





BAB VI PENANGANAN AKSI UNJUK RASA

Foto: Irgi Nur Fadil pada Pexel

KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM KORIDOR KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan dibatasi oleh hak-hak orang lain serta ketertiban umum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu bentuk kebebasan yang diatur oleh UUD 1945 adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, atau yang dikenal sebagai unjuk rasa. Hak ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat wajib melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum agar pelaksanaannya tertib, damai, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara khusus mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, yang meliputi:

- Unjuk rasa
- Pawai
- Rapat umum
- Mimbar bebas



Adapun mekanisme pelaksanaannya meliputi:

- Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian oleh pihak yang bertanggung jawab, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Surat pemberitahuan harus mencantumkan maksud dan tujuan kegiatan, lokasi dan rute, waktu dan durasi, bentuk kegiatan, nama penanggung jawab, serta jumlah peserta dan alat peraga yang akan digunakan.
- Setiap 100 peserta wajib memiliki 1–5 orang penanggung jawab.
- Setelah menerima pemberitahuan, Polri berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan tanda terima
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan
 - c. Berkoordinasi dengan instansi tujuan aksi
 - d. Menyiapkan pengamanan lokasi dan rute
- Jika aksi dibatalkan, maka pemberitahuan pembatalan wajib disampaikan secara tertulis paling lambat 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan, hingga perbuatan yang menyebabkan korban jiwa. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak demokratis yang penting, namun tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab.



Untuk menjaga penyampaian pendapat agar tetap dalam koridor hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menekankan lima asas utama:

- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Musyawarah dan mufakat
- Kepastian hukum dan keadilan
- Proporsionalitas
- Manfaat

Kebebasan menyampaikan pendapat juga diperkuat melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan ini menetapkan prosedur teknis pengamanan dan penanganan pelaksanaan penyampaian pendapat, termasuk apabila ditujukan kepada lembaga tinggi negara seperti Presiden atau DPR.

Lingkungan Lembaga Kepresidenan merupakan salah satu lokasi strategis yang sering dijadikan titik penyampaian aspirasi publik. Namun demikian, kawasan ini juga termasuk wilayah yang paling dilindungi, mengingat kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan negara. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat diperkenankan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden melalui mekanisme yang diatur dan difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) bekerja sama dengan Polri dan TNI sebagai garda terdepan dalam menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan aksi penyampaian pendapat, khususnya di lingkungan Istana Kepresidenan.

PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting dalam dinamika demokrasi Indonesia karena menjadi momentum pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak, yang mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Situasi ini secara langsung memengaruhi intensitas penyampaian aspirasi publik, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik terhadap proses politik dan arah kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) mencatat telah menangani sebanyak **441 aksi unjuk rasa** yang berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan dan sekitarnya sepanjang tahun 2024. Aksi-aksi ini datang dari beragam kelompok masyarakat dan membawa berbagai isu strategis yang menjadi perhatian publik.

Setidaknya terdapat lima isu utama atau sorotan substansi yang paling banyak disuarakan dalam unjuk rasa selama tahun tersebut:

1. Politik dan Keamanan

Aspirasi terkait netralitas penyelenggara pemilu, transparansi proses demokrasi, isu polarisasi politik, serta tuntutan atas stabilitas keamanan nasional, menjadi fokus utama masyarakat menjelang dan pasca pemilihan umum.

2. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Masyarakat menyuarkan perlunya penegakan hukum yang adil, kritik terhadap kriminalisasi aktivis, serta penanganan pelanggaran HAM baik masa lalu maupun yang terjadi dalam dinamika kontemporer.

3. Ketenagakerjaan

Tuntutan terkait upah layak, penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja mewarnai banyak aksi demonstrasi oleh serikat pekerja dan komunitas buruh.

4. Pertanahan dan Perumahan

Isu pengadaan lahan, konflik agraria, serta akses terhadap hunian layak menjadi sorotan penting, termasuk permintaan keadilan bagi warga terdampak pembangunan proyek strategis nasional dan pengamanan kawasan pertahanan.

5. Keagamaan dan Toleransi

Aspirasi menyangkut kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas, serta penolakan terhadap intoleransi dan diskriminasi berbasis keyakinan juga menjadi tema unjuk rasa yang cukup signifikan.

Penanganan seluruh aksi tersebut dilakukan oleh Kemensetneg secara koordinatif dan persuasif, bekerja sama dengan Polri, TNI, serta instansi teknis terkait lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, pelayanan yang responsif, dan pengamanan yang humanis. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemensetneg sebagai institusi yang menjembatani komunikasi antara rakyat dan Presiden, sekaligus memastikan bahwa penyampaian pendapat berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Politik dan Keamanan

- Koalisi Mahasiswa Nasional Indonesia (KMNI) dan Pemuda Indonesia Center (PIC), 2 Februari 2024
Tuntutan: Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 bebas dari kecurangan
- Gabungan Mahasiswa dan Elemen Masyarakat, 7 Februari 2024
Tuntutan: Pilih pemimpin berdasarkan rekam jejak
- UU Pilkada, 22 Agustus 2024
- Demo jelang pemilu, 20 Maret 2024

2. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), 16 Mei 2024
Tuntutan: Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu

3. Ketenagakerjaan

- Hari Buruh, 1 Mei 2024
Tuntutan: Permohonan untuk memperhatikan nasib para pekerja dan buruh.
- Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI), 6 Juni 2024
Tuntutan: Tolak Peraturan Pemerintah tentang TAPERA, tolak UKT mahal, tolak aturan kris BPJS Kesehatan dan tolak *omnibus law* UU Cipta Kerja No. 6 tahun 2023.
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 17 Juli 2024
Tuntutan: "Cabut *omnibus law* UU Cipta Kerja, Hapus *Outsourcing* Tolak Upah Murah dan Cabut UU No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah"
- Aksi Unjuk Rasa Dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Fsp Rtm - Spsi)
Tuntutan: Tetapkan upah DKI Jakarta Tahun 2025 diatas upah minimum.

- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 24 Oktober 2024
Tuntutan: Naikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10% dan cabut *omnibus law* UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
- Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat
Tuntutan: Revisi UU Pemilu, stabilkan harga pokok dan cabut UU Cipta kerja.

4. Pertanahan dan Perumahan

- Forum Gabungan Empat Rusun Kemayoran Apron, Boing, Conver, dan Dakota, 30 Mei 2024
Tuntutan: Turunkan harga sewa Rusun Apron, Boing, Conver dan Dakota.

5. Keagamaan dan Toleransi

- Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, 24 Mei 2024
Tuntutan: Menyikapi meningkatnya agresi, penindasan dan genosida yang menimpa kaum muslim di Palestina.
- Aksi 411 oleh Front Persaudaraan Islam, 4 November 2024
Tuntutan: Aksi persaudaraan umat Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina.



BAB VII MONITORING DAN ANALISIS MEDIA

Foto: Digital Bugu pada Pexel

1. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Januari 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan mengenai Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berjumlah 2.702 berita dari 667 media *online* dan 142 berita dari 61 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Agenda Kepresidenan; (2) Pengunduran Diri Mahfud MD; (3) Pembangunan IKN.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg didominasi oleh netral - positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait agenda kepresidenan. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tanzania, Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden Samia Suluhu Hassan di Istana Bogor. Pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Samia membahas berbagai isu strategis, seperti kerja sama ekonomi, investasi, infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Koordinator Staf Khusus Presiden (3.979 pemberitaan), Cawapres Mohammad Mahfud MD (2.458 pemberitaan), dan Presiden Joko Widodo (1.387 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Koordinator Staf Khusus Presiden (205 pemberitaan), Sekjen PDI-P (99 pemberitaan), dan Cawapres Mohammad Mahfud MD (93 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Februari 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan mengenai Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) berjumlah 2.702 berita dari 667 media *online* dan 142 berita dari 61 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Agenda Kepresidenan; (2) Pengunduran Diri Mahfud MD; (3) Pembangunan IKN.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemsetneg didominasi oleh netral-positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait agenda kepresidenan. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tanzania, Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden Samia Suluhu Hassan di Istana Bogor. Pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Samia membahas berbagai isu strategis, seperti kerja sama ekonomi, investasi, infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Koordinator Staf Khusus Presiden (3.979 pemberitaan), Cawapres Mohammad Mahfud MD (2.458 pemberitaan), dan Presiden Joko Widodo (1.387 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Koordinator Staf Khusus Presiden (205 pemberitaan), Sekjen PDI-P (99 pemberitaan), dan Cawapres Mohammad Mahfud MD (93 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Maret 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan mengenai Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 1.900 berita dari 550 media *online* dan 79 berita dari 42 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) KTT ASEAN-Australia; (2) Pindahan ASN ke IKN; (3) dan Pembangunan IKN.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh sentimen positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers sebelum berangkat ke Australia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Australia di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

3. Top person

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Joko Widodo (1.923 pemberitaan), Mensesneg (1.712 pemberitaan), dan Cawapres Mohammad Mahfud MD (878 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Joko Widodo (117 pemberitaan), Mensesneg (61 pemberitaan), dan Koordinator Staf Khusus Presiden (61 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

4. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode April 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan mengenai Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 2.000 berita dari 616 media *online* dan 86 berita dari 45 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Pembangunan IKN; (2) Agenda Kepresidenan; dan (3) Gugatan Sengketa Pemilu.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh sentimen positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo secara resmi mengukuhkan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Upacara pelantikan tersebut dilangsungkan di Istana Negara. Pemberitaan lainnya yaitu Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Top person

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Menteri Kominfo (1.054 pemberitaan), Mensesneg (1.038 pemberitaan), dan Menteri PANRB (546 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Menteri Kominfo (74 pemberitaan), Mensesneg (60 pemberitaan), dan Menteri PANRB (21 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Mei 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 3.180 berita dari 3.050 media *online* dan 130 berita dari media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Agenda Kepresidenan; (2) Penetapan Pansel Capim KPK; dan (3) KTT World Water Forum.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif-netral. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC).

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Joko Widodo (1.752 pemberitaan), Mensesneg Pratikno (1.088 pemberitaan), dan Mantan Menkopolkam, Mohammad Mahfud Md (1.387 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Mensesneg Pratikno (78 pemberitaan), Presiden Joko Widodo (62 pemberitaan), dan Jubir Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P, Chico Hakim (29 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan PP Nomor 24 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

6. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Juni 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 4.616 berita dari 4.462 media *online* dan 154 berita dari media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Pengunduran Diri Kepala & Wakil OIKN, (2) Persiapan HUT RI ke-79; dan (3) Pembangunan IKN.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo menerima pimpinan MPR RI di Istana Merdeka. Pertemuan Presiden dengan Ketua dan 8 Wakil Ketua MPR tersebut digelar dalam rangka forum konsultasi yang membahas terkait pentingnya komunikasi antar lembaga untuk membangun sinergi nasional. Serta membahas rangkaian acara Peringatan HUT RI pada tahun ini.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Mensesneg Pratikno (5.923 pemberitaan), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (1.949 pemberitaan), dan Presiden Joko Widodo (1.832 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Mensesneg Pratikno (175 pemberitaan), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (76 pemberitaan), dan Presiden Joko Widodo (38 pemberitaan).

4. **Ekspos produk perundang-undangan**

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024 yang menunjuk Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional pembangunan IKN.

7. **Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Juli 2024**



1. **Ekspos dan isu pemberitaan**

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 4.320 berita dari 4.113 media *online* dan 207 berita dari media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Agenda Kepresidenan, (2) Pembangunan IKN; dan (3) Persiapan HUT ke-79 RI.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno menerima kunjungan pengurus KADIN Kalimantan Timur serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Timur di Istana Garuda, Kawasan IKN. Pertemuan tersebut membahas beberapa isu penting terkait keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan IKN. Presiden Jokowi mendukung peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN. Presiden menekankan pentingnya peran KADIN dan HIPMI tidak hanya sebagai subkontraktor tetapi sebagai pemain utama dalam proyek ini.

3. Top person

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Jokowi (2.503 pemberitaan), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (926 pemberitaan), dan Deputy Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana (552 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Jokowi (106 pemberitaan), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (67 pemberitaan), dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (51 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

8. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Agustus 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 7.480 berita dari 7.128 media *online* dan 352 berita dari media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) HUT RI ke-79, (2) Kabinet Prabowo-Gibran; dan (3) Pilkada 2024.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif-netral. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah Palestina, "Grand Collar Order of the State of Palestine". Penghargaan tersebut diserahkan langsung Utusan Khusus Presiden Palestina, Riyad Al Malik. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Joko Widodo (3.727 pemberitaan), Mensesneg Pratikno (2.936 pemberitaan), dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (1.047 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Jokowi (176 pemberitaan), Mensesneg Pratikno (152 pemberitaan), dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (55 pemberitaan).

4. **Ekspos produk perundang-undangan**

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

9. **Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode September 2024**



1. **Ekspos dan isu pemberitaan**

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 7.480 berita dari 7.128 media *online* dan 352 berita dari media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) HUT RI ke-79, (2) Kabinet Prabowo-Gibran; dan (3) Pilkada 2024.

2. **Sentimen pemberitaan**

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh netral-positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah Palestina, "Grand Collar Order of the State of Palestine". Penghargaan tersebut diserahkan langsung Utusan Khusus Presiden Palestina, Riyad Al Malik. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Joko Widodo (3.727 pemberitaan), Mensesneg Pratikno (2.936 pemberitaan), dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (1.047 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Jokowi (176 pemberitaan), Mensesneg Pratikno (152 pemberitaan), dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (55 pemberitaan).

4. **Ekspos produk perundang-undangan**

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

10. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Oktober 2024



1. **Ekspos dan isu pemberitaan**

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 9.980 berita dari 1.402 media *online* dan 477 berita dari 82 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Pelantikan Anggota Kabinet Merah Putih; (2) Agenda Kepresidenan; dan (3) Pembangunan IKN.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif. Hal ini didorong oleh pemberitaan terkait Mensesneg Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar semua kementerian berkolaborasi untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai target swasembada pangan dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun mendatang. Ia menekankan bahwa sebagai negara yang memiliki potensi agraris, Indonesia seharusnya tidak tergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

3. Top person

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Prabowo Subianto (6.420 pemberitaan), Mantan Mensesneg Pratikno (3.544 pemberitaan), dan Mensesneg Prasetyo Hadi (3.029 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Prabowo Subianto (223 pemberitaan), Mantan Mensesneg Pratikno (180 pemberitaan), dan Mensesneg Prasetyo Hadi (166 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara
- Perpres Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.

11. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode November 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 2,759 berita dari 741 media *online* dan 123 berita dari 54 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Agenda Kepresidenan, (2) Pelantikan Pejabat Baru Kemensetneg, (3) Penetapan Hari Libur Nasional Pilkada 2024.

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh sentimen positif. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, lebih tinggi dari usulan awal Menteri Tenaga Kerja sebesar 6 persen. Keputusan ini diambil setelah pembahasan dengan pimpinan buruh untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perekonomian nasional. Pengumuman resmi disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada 29 November 2024.

3. Top person

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Prabowo Subianto (1.931 pemberitaan), Mensesneg Prasetyo Hadi (1.149 pemberitaan), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (876 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Prabowo Subianto (93 pemberitaan), Mensesneg Prasetyo Hadi (43 pemberitaan), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (23 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- UU Nomor 67-71 Tahun 2024
- Perpres Nomor 141-147 Tahun 2024.

12. Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Desember 2024



1. Ekspos dan isu pemberitaan

Frekuensi pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara berjumlah 2.763 berita dari 618 media *online* dan 106 berita dari 43 media cetak. Beberapa isu utama yang dibahas media terkait (1) Program Makan Bergizi Gratis, (2) Agenda Kepresidenan, (3) Peraturan Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).

2. Sentimen pemberitaan

Sentimen pemberitaan Kemensetneg didominasi oleh positif-netral. Sentimen positif didorong oleh pemberitaan terkait Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Selasa sore, 31 Desember 2024. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, dan Partai Golkar siap mendukung serta mengawal kebijakan yang diumumkan.

3. *Top person*

Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden Prabowo Subianto (2.064 pemberitaan), Mensesneg Prasetyo Hadi (1.692 pemberitaan), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (1.067 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden Prabowo Subianto (67 pemberitaan), Mensesneg Prasetyo Hadi (43 pemberitaan), dan Menteri Agama, Nasaruddin Umar (12 pemberitaan).

4. Ekspos produk perundang-undangan

Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media yaitu:

- Perpres Nomor 203 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN)
- Perpres Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



PEMBUKAAN RAKORNAS KPI 2024 DAN PERINGATAN HARSIARNAS KE-91

PENYERAPAN INDUSTRI TUMBUH BERTAHAN DAN HARMONISASI

BAB VIII PENGHARGAAN

Foto: Humas Kemensetneg

1. Kontribusi Konten Audio Visual



Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih Peringkat 1 dalam Anugerah Media Center 2024 untuk kategori Kontribusi Konten Audio-Visual (5/3/2024). Penganugerahan penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Trans Convention Centre, Bandung. Melalui pengelolaan konten audio-visual yang kreatif dan informatif, Kemensetneg berkomitmen kuat dalam menyajikan komunikasi publik yang berkualitas di platform media sosial, sekaligus memperkuat transparansi dan keterlibatan masyarakat.

2. Kontributor Media Sosial



Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih penghargaan Anugerah Narasi Tunggal sebagai Kontributor Media Sosial Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan kontribusi aktif Kemensetneg dalam menyampaikan informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami kepada publik melalui berbagai platform media sosial. Melalui narasi yang terintegrasi dan penyajian konten yang relevan, Kemensetneg dinilai berhasil memperkuat peran pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang transparan, edukatif, dan partisipatif di era digital.

3. Lembaga Peduli Penyiaran KPI



Kementerian Sekretariat Negara meraih penghargaan sebagai salah satu Lembaga Peduli Penyiaran yang turut berkontribusi dalam perkembangan industri penyiaran di tanah air. Penghargaan diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2024 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-91 di ICE BSD pada Senin (24/6/2024).

4. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik



Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan penghargaan "*Popular Government Institutions 2024*" dari The Economics Media yang bekerja sama dengan Axia Research. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada 5th Public Relations Summit 2024 di Auditorium Kemenparekraf, Jakarta pada Jumat (9/10/2024).

5. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik



Kementerian Sekretariat Negara menerima penghargaan Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Kategori Instansi Pembina Tahun 2024 pada Selasa (8/10/2024). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB saat acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang bertajuk Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif.



Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara